



**EFEKTIVITAS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
WILAYAH II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG (DPUTR) DALAM PEMELIHARAAN RUAS JALAN
KABUPATEN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Rifi Rivani Radiansyah & Aripin

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bale
Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Rifi3112@gmail.com

Received: 2 Januari 2023; Revised: 10 Januari 2023; Accepted: 13 Januari 2023; Published: Januari 2023; Available online: Januari 2023.

ABSTRAK

Banyaknya pengendara yang cenderung mencari jalan alternatif untuk menghindari jalanan yang rusak hanya untuk menuju lokasi tertentu menjadi fenomena nyata di beberapa wilayah di Bandung Barat yang mengindikasikan adanya permasalahan bahwa, efektivitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dalam pemeliharaan ruas jalan kabupaten di Kabupaten Bandung Barat belumlah optimal. Riset yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan tersebut, dilaksanakan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif secara keseluruhan dengan unit pelaksana teknis (UPT) wilayah II sebagai objek risetnya. Kemudian, teknik penentuan informan riset ini dilakukan secara *purposive sampling*, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan metode dokumentasi juga pendekatan literatur. Adapun teknik analisis data dalam riset ini dilakukan dengan menggunakan reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Hasil riset ini menunjukkan, bahwa UPT telah melaksanakan tugas pemeliharaan ruas jalan sesuai dengan apa yang menjadi program dan kewajiban unit kerja, terutama yang berkenaan dengan sasaran pemeliharaan ruas jalan. Hanya saja, perihal tepatnya waktu pemeliharaan, tercapainya tujuan dan perubahan nyata seringkali terhambat. Hal itu disebabkan oleh minimnya sumber daya baik itu sumber daya manusia secara kuantitas maupun sumber daya keuangan yang berkenaan dengan manajemen waktu anggaran yang seringkali tidak terintegrasi dengan kondisi lapangan.

Kata Kunci: Efektivitas, Unit Pelaksana Teknis, Pemeliharaan

ABSTRACT

The large number of motorists who tend to look for alternative roads to avoid damaged roads only to go to certain locations is a real phenomenon in several areas in West Bandung which indicates that there is a problem, namely the effectiveness of the Technical Implementation Unit (UPT) Region II Public Works and Spatial Planning (DPUTR) in the maintenance of district roads in West Bandung Regency is not yet optimal. Research that aims to identify and understand these problems is carried out using a qualitative method which is descriptive in its entirety with the Technical Implementation Unit (UPT) Region II as the research object. Then, the technique of determining research informants was carried out using purposive sampling, while data collection was carried out through observation, in-depth interviews, and documentation methods as well as a literature approach. The data analysis techniques in this research were carried out using data reduction, data display and drawing conclusions. The results of this research show that the UPT has carried out the task of maintaining roads in accordance with what is the program and obligations of the work unit, especially with regard to road maintenance targets. It's just that, regarding the exact timing of maintenance, achievement of goals and real change are often hampered. This is caused by the lack of resources, both human resources in quantity and financial resources related to budget time management which are often not integrated with field conditions.

Keywords: *Effectiveness, Technical Implementation Unit, Maintenance*

PENDAHULUAN

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, kurang lebih 1,8 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 1.389 jiwa/Km² (BPS Kabupaten Bandung Barat, 2022). Konsekuensi tersebutlah yang kemudian dapat mengulas kembali nostalgia wacana semangat otonomi daerah di mana pemerintah daerah mau tidak mau harus memberikan pelayanan efektif, dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan (Otonomi Daerah) (Radiansyah, 2019).

Dengan jumlah penduduk tersebut beberapa faktor yang tentunya menjadi fokus utama untuk menunjang aspek ekonomi (Herinoto, R, & Zulfanetti, 2021), pendidikan (Mustafa & Sasmito, 2017), dan urusan Kesehatan (Rosyid & Lukito, 2019) adalah infrastruktur jalan/jalur transportasi, khususnya jalan penghubung antara desa, kecamatan maupun kabupaten/kota dan provinsi, yang secara kewenangan menjadi tugas dari peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung Barat.

Dalam hal ini, infrastruktur jalan/jalur transportasi menjadi hal yang sangat penting diutamakan sekaligus menjadi salah satu parameter penting kemandirian dan kemajuan suatu daerah, mengingat bahwa infrastruktur jalan merupakan bagian yang nantinya dapat menjembatani ketiga aspek yang disebutkan sebelumnya, terutama di dalam membangun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat menjadi lebih baik sesuai dengan amanat visi dan misi pembangunan daerah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Oleh karenanya, peran Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung Barat menjadi sangat urgen dan begitu sangat vital. Namun, perlu untuk diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dan perannya tersebut tidaklah mudah, juga tidak hanya dapat dilakukan melalui peran internal dinas secara administratif, kebijakan, maupun secara konsep perencanaan saja.

Konsekuensi dari hal itu adalah dibutuhkan pelaksana teknis seperti UPT (unit pelaksana teknis) di setiap daerah agar setiap pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan jalur transportasi di wilayah sesuai zonanya masing-masing dapat dilakukan secara optimal. Di Bandung Barat sendiri UPT (unit pelaksana teknis) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)

diatur melalui Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 tahun 2020, yang secara rinci bertugas sebagai pelaksana pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan jalan (Bandung Barat, 2019).

Berdasarkan pembagian kerjanya di Bandung Barat, UPT yang bertugas membantu bidang Bina Marga yang langsung di bawah kendali Kepala Dinas sendiri dibagi ke dalam dua pembagian wilayah, diantaranya UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II. Hal ini dapat membuktikan, bahwa jelas adanya UPT merupakan perpanjangan tangan dari Dinas, yang mestinya mampu melaksanakan pemeliharaan ruas jalan, sehingga setiap kegiatan mampu berjalan secara efektif.

Namun ternyata, aturan kebijakan yang ada dengan kondisi di lapangan seringkali tidak beriringan atau malah jauh panggang dari api, bahkan persoalan mencuat menjadi permasalahan ketika efektivitas Unit Teknis Pelaksana (UPT) mulai dipertanyakan, terutama dalam hal ini adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah II yang diantaranya meliputi zona kerja delapan kecamatan diantaranya mulai dari Kecamatan Batujajar hingga Kecamatan Rongga (wilayah selatan Bandung Barat).

Dapat digaris bawahi bahwa efektivitas suatu kinerja organisasi dapat ditinjau melalui beberapa aspek yang diantaranya, sejauh

Rifi Rivani Radiansyah & Aripin, Efektivitas Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dalam Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Bandung Barat

mana unit kerja dapat memahami suatu program, kerja yang dilakukan sesuai dan tepat sasaran, mekaniske kerja yang tepat waktu, tercapainya tujuan berdasarkan perencanaan awal, dan perubahan nyata yang konkrit (Sutrisno, 2007).

Berkaitan dengan riset ini, salah satu fenomena yang ada di zona Wilayah II UPT DPUTR adalah masih banyaknya pengendara yang cenderung mencari jalan alternatif untuk menuju lokasi tertentu di zona wilayah II UPT, seperti misal pengendara yang cenderung menghindari jalan yang rusak/berlubang (dara.co.id, 2021) atau pun hanya sekadar memutar jalur, hanya karena khawatir akan mengakibatkan kecelakaan (BBPos, 2021) atau pun berdampak pada rusaknya kendaraan pribadi akibat parahnya ruas jalan di titik-titik tertentu zona II Wilayah UPT DPUTR Kabupaten Bandung Barat (BandungSatu.com, 2021).



Jalan Raya pertigaan Sasak Bubur, Kecamatan Cihampelas, KBB yang berlubang besar (dara.co.id, 2021).



Jalan rusak di wilayah Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (PikiranRakyat.com, 2022)



Jalan Cikoneng, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB) (TribunJabar.id, 2022)

Kondisi tersebut setidaknya menimbulkan indikasi bahwa adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) DPUTR sama sekali tidak memberikan efek ataupun dampak yang signifikan atau bahkan dapat diasumsikan sementara tidak optimal dengan baik. Padahal UPT

di sini sudah jelas menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada kinerja dinas itu sendiri. Bahkan dijelaskan secara eksplisit berdasarkan pasal 33 point b pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Pemeliharaan Jalan bahwa pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa pada tataran pengoperasian dan pemeliharaan ruas jalan kabupaten dan desa, harus mampu merawat jalan desa sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dan mampu memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan umum, khususnya pemeliharaan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti berasumsi bahwa permasalahan yang mencuat dalam riset ini berkenaan dengan beberapa hal, diantaranya, kurang matangnya perencanaan Dinas terkait yang berkaitan dengan pemahaman program yang nantinya akan dilaksanakan UPT, kerja yang dilakukan UPT belum tepat sasaran berdasarkan timeline perencanaan yang telah ditentukan diawal, mekaniske kerja belum tepat waktu berkenaan dengan segala aspek sumber daya yang ada (sdm dan anggaran), tujuan yang tidak jelas arah kebijakannya, sehingga perubahan nyata dan konkrit berkenaan dengan permasalahan yang ada belum dapat terwujud.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mendalami permasalahan ini ke dalam judul riset "Efektivitas Unit Pelaksana Teknis (Upt) Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dputr) Dalam Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Bandung Barat".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, rumusan masalah riset ini adalah "Bagaimana Efektivitas Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR) dalam Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Bandung Barat?"

KERANGKA PEMIKIRAN

Secara umum efektivitas pada dasarnya suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang cenderung diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya (Kasim, 2015).

Jadi, secara penalaran logis suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

Pemeliharaan ruas jalan adalah penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan

perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu-lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Untuk mengadakan pengukuran mengenai Efektivitas, penulis menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno Edy (2007), maka peneliti menggabungkan antara konseptual dengan Efektivitas Unit Pelaksana Teknis dalam Pemeliharaan Ruas Jalan:

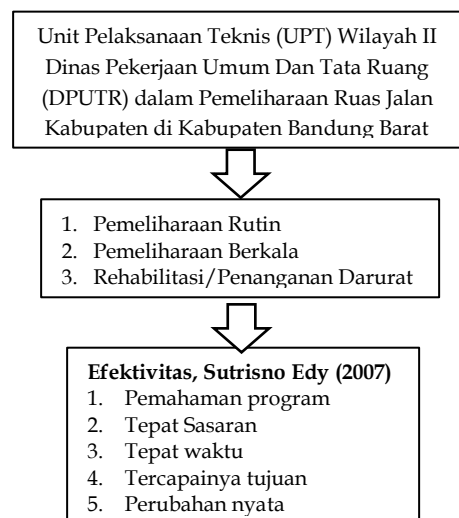
1. Pemahaman Program yang dimaksud adalah bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum/sudah memahami dan mengerti akan tugas dan tanggungjawab mereka dalam pelayanan terhadap masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing.
2. Tepat Sasaran dimaksud adalah kemampuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengambil keputusan, terlebih dalam memberi pelayanan yang pada dasarnya adalah cara melayani, membantu menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang, sekelompok orang atau masyarakat.
3. Tepat Waktu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

tingkat kedisiplinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

4. Tercapainya Tujuan yang dimaksud dari Indikator ini adalah berhasil atau tidaknya suatu usaha yang dilakukan dalam menggapai apa yang telah diharapkan atau direncanakan sebelumnya.
5. Perubahan Nyata adalah perubahan keadaan yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis (UPT), apakah pemeliharaan ruas jalan sudah berjalan dengan baik (Sutrisno, 2007).

Berdasarkan definisi di atas maka mengacu pada uraian variabel tersebut, maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

BAGAN 1 ALUR BERPIKIR





Efektivitas Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata
Ruang (DPUTR) dalam Pemeliharaan Ruas
Jalan Kabupaten di Kabupaten Bandung Barat

METODE PENELITIAN

Dalam proses riset ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan cara di dalam mengungkapkan dan menelaah permasalahan dengan menggambarkan dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta yang ada, sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Nasir, 2005).

Objek yang diteliti dalam riset ini adalah Unit Teknis Pelaksana (UPT) Wilayah II DPUTR Kabupaten Bandung Barat. Teknik penentuan Informan dalam riset ini menggunakan metode purposive sampling yang pengambilan sampelnya di sesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang di tetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Ghony & Almanshur, 2012). Penggunaan teknik tersebut menentukan beberapa target informan diantaranya, Kepala UPT Wilayah II, Ka.Sub.Bag TU, dan beberapa pelaksana UPT.

Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam riset ini menggunakan metode observasi,

wawancara, dan dokumentasi, serta teknik kepustakaan (Ghony & Almanshur, 2012). Sedangkan teknik analisis data dalam riset ini peneliti menggunakan metode reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

PEMBAHASAN

Efektivitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dalam Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Bandung Barat.

Berkenaan dengan pemeliharaan ruas jalan kabupaten, konsep mengenai jalan merupakan konsep utama dalam penelitian ini. Menurut Wignall (1999), salah satu bagian dari sistem transportasi yang merupakan prasarana umum/infrastruktur adalah jalan, yang didefinisikan sebagai jalur dimana masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa memerlukan izin khusus untuk itu.

Maka dari itu, perlu adanya pemeliharaan untuk tetap menjaga kenyamanan masyarakat. Dari penjelasan tersebut muncullah konsep pemeliharaan jalan yang dimaksud dalam riset penelitian ini. Menurut Mahmud dkk (2002, hal. 15), rencana pemeliharaan jalan meliputi sistem informasi, sistem manajemen aset, dan rencana penanganan pemeliharaan jalan yang meliputi pemeliharaan

rutin, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi.

Dalam hal ini, berdasarkan wawancara peneliti bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lapangan berhasil memberikan informasi yang menjelaskan bahwa, secara garis besar dengan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah II yang meliputi 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling, sampai dengan saat ini sudah cukup memberikan kinerja yang efektif karena tidak mungkin dengan luasnya daerah wilayah II pemeliharaan ruas jalannya dilaksanakan oleh Bidang Bina Marga, maka dengan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) sangat membantu, hanya saja beberapa keterbatasan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran pemerintah yang masih tersendat, sedangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur mau tidak mau mesti dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal.

Meski begitu beberapa hal yang akan di dalam di dalam riset ini, akan peneliti uraian lebih lanjut berdasarkan beberapa aspek yang diantaranya, sejauh

mana unit kerja dapat memahami suatu program, kerja yang dilakukan sesuai dan tepat sasaran, mekaniske kerja yang tepat waktu, tercapainya tujuan berdasarkan perencanaan awal, dan perubahan nyata yang konkrit (Sutrisno, 2007).

A. Pemahaman Program

Pemeliharaan Ruas Jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu-lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai (Salim, 2002).

Program-program yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah II dalam melaksanakan pemeliharaan ruas jalan kabupaten pada dasarnya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum tentang tata cara proses pelaksanaan pemeliharaan ruas jalan yakni dengan memanfaatkan secara optimal

saran dan prasarana yang ada. Artinya, sejauh ini berdasarkan hasil wawancara dilapang bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT), pemahaman program di internal dinas sendiri sudah cukup baik, beberapa hal yang telah dilakukan diantaranya seperti diantaranya:

a. Proses Penyusunan Perencanaan Program

Proses Penyusunan /Perencanaan dalam hal ini merupakan suatu kegiatan atau cara untuk memproses sesuatu dan atau kumpulan data yang nantinya dapat digunakan untuk rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Bina Marga dilapangan. Dalam sebuah penyusunan kegiatan pemeliharaan ruas jalan, ada beberapa hal yang telah dilakukan DPUTR Kabupaten Bandung Barat melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah II lakukan. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis melalui hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah II Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, menyatakan pada dasarnya sebelum pemeliharaan ruas jalan dilakukan UPT terlebih dahulu melakukan observasi lapangan untuk memperoleh data yang nantinya diperlukan untuk kebutuhan administrasi dan tentang kondisi jalan-jalan di

beberapa titik zona yang dirasa perlu untuk ditindaklanjuti.

Selain observasi melalui pengamatan, survei merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan sebelum mengambil keputusan, hal ini dilakukan pada dasarnya untuk dapat mengetahui tingkat kerusakan jalan dan penanganan seperti apa yang harus dilakukan dalam pemeliharaan ruas jalan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 13 /PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Pemilikan Jalan Pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa survei pemeliharaan jalan dimaksudkan untuk memperoleh data administrasi dan data kondisi jalan secara lebih konkrit.

Setelah proses observasi dan survei dilakukan, maka selanjutnya yang diperlukan ialah pengadaaan anggaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat pada saat wawancara dengan peneliti, bahwa proses pengalokasi anggaran jalan itu ditentukan oleh beberapa kriteria:

1. Usulan masyarakat, melalui proses seperti, masyarakat bersurat ke Kabupaten tembusan ke dinas PUTR bahwa ruas jalan ini rusak sekian panjangnya dan kerusakannya sekian;
2. Usulan dari pemerintah setempat (dinas PUTR)

melalui mekanisme dinas PU melihat bahwa di ruas jalan sana perlu penanganan;

3. Ada intervensi dari pusat penanganan dari pusat kriteria yaitu wilayah strategis. Seperti ruas jalan wilayah yang terhubung dengan pariwisata, pertanian, itu intervensi dari pusat (6 Juli 2022).

Setelah pengalokasian anggaran dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Pasal 14 Ayat 3 berbunyi: Pembiayaan kegiatan pemeliharaan ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 9, dan pasal 10 untuk status jalan kabupaten/kota dan jalan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota (APBD Kab/Kota). Hal tersebut juga ditegaskan kembali Kepala Sub bagian Tata Usaha melalui wawancara bersama peneliti, yang mengatakan bahwa sejauh yang telah dilakukan Dinas alokasi anggaran yang sudah ada, pada tahap prosesnya dimasukan ke dalam rencana anggaran Dinas untuk kemudian dikembalikan lagi kepada aktivitas pekerjaan yang telah di plotting seperti halnya untuk pemeliharaan jalan rutin yang

dilaksanakan Dinas melalui UPT di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa pada aspek pemahaman program pada dasarnya pihak dinas jauh cukup memahami prosesnya.

b. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya merupakan kegiatan dalam proses manajemen internal organisasi yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana. Menurut Drs. Chabi Soleh, MM dalam buku *Asas-Asas Manajemen* (1999:109), Pengawasan adalah suatu pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh yang dilakukan secara sadar dengan membandingkan antara yang seharusnya dan yang dilaksanakan.

Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja

pegawai dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi sangat perlu diadakan pengawasan, karena pengawasan pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan. Terkait hal tersebut, peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara bersama dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung Barat, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya, pemeliharaan jalan telah berlangsung dengan sangat baik, hanya saja eksekusi program yang direncanakan memang kerap kali tidak sesuai dengan kondisi internal organisasi pemerintah daerah yang ada sekarang ini.

c. Perizinan

Pada dasarnya Izin merupakan bagian dari aktivitas administrasi pemerintah/negara yang ditentukan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa izin merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya.

Dalam hal ini, salah satu perangkat administrasi adalah organisasi, organisasi ini bisa berjalan dengan baik apabila dilakukannya pembagian tugas sebagai koordinasi dan pengawasan. Sehubungan

dengan itu, maka peneliti dalam riset ini mendapatkan informasi berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung Barat, yang menegaskan bahwa sejauh ini kegiatan pemeliharaan ruas jalan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya itu dituangkan ke dalam dokumen rencana penanganan jalan sesuai dengan persyaratan teknis. Rencana penanganan pemeliharaan jalan pada dasarnya sudah diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal perizinan, kegiatan pemeliharaan ruas jalan ini di masukkan dalam program kerja Dinas yang tentunya telah memiliki izin sebelumnya. Kegiatan pembangunan jalan sejak dari dulu hingga sekarang ini telah memiliki izin, sedangkan kegiatan pemeliharaan ruas jalan kabupaten harus seiring dengan kegiatan membangun jalan. Hal ini telah dijelaskan menurut pasal 4 bagian B nomor 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah dengan sangat jelas memberikan izin terhadap pemeliharaan atas jalan.

B. Tepat Sasaran

Tepat Sasaran yang dimaksud dalam riset ini pada dasarnya ialah kemampuan dari

Pemerintah/Perangkat Daerah dalam mengambil keputusan, terlebih dalam memberi pelayanan yang pada dasarnya adalah cara melayani, membantu menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang, sekelompok orang atau masyarakat.

Setiap aktivitas atau program yang dijalankan dalam pemeliharaan ruas jalan kabupaten berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan pada dasarnya sudah tepat sasaran, dan mengacu pada program penyusunan, pengawasan dan perizinan yang ada, sehubungan dengan itu, maka peneliti pun mendapatkan informasi lain melalui wawancara dengan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah II, yang menegaskan bahwa kegiatan Pemeliharaan ruas jalan kabupaten yang akan dilaksanakan pada dasarnya sesuai dengan program-program yang sudah dibuat, seperti perencanaan/penyusunan programnya, pengawasan terhadap pekerjaan dan masalah izinnya semuanya sudah selesai”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kerja yang dilakukan UPT Wilayah II pada dasarnya sudah sesuai dan tepat sasaran. Hanya saja beberapa hal yang menjadi hambatan adalah bagaimana cara pihak Dinas melakukan keputusan yang sesuai

dengan perencanaan yang telah direncanakan sejak awal.

C. Tepat Waktu

Tepat Waktu yang dimaksud dalam riset penelitian ini adalah tingkat kedisiplinan Pemerintah/Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dalam proses pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan dalam proses pemeliharaan ruas jalan di zona Wilayah II UPT DPUTR Kabupaten Bandung Barat.

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ruas jalan kabupaten di Kabupaten Bandung Barat pada umumnya sudah tepat waktu, hal ini senada dengan pernyataan dari salah seorang pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah II, melalui wawancara Bersama dengan peneliti yang mengatakan bahwa, hampir sejauh ini pelaksanaan pemeliharaan ruas jalan kabupaten khususnya telah dilakukan dengan tepat waktu, apalagi yang berkaitan dengan agenda prioritas Bupati tentunya.

Namun memang, setiap kegiatan yang dijalankan dalam pemeliharaan ruas jalan kabupaten tidaklah selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, selalu saja ada permasalahan ditengah-tengah aktivitas

kegiatan berjalan yang seringkali akan menimbulkan suatu masalah. Masalah tersebut dapat diatasi dengan melakukan berbagai cara melalui proses penanggulangan. Penanggulangan dalam hal ini merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi. Seperti halnya aktivitas pemeliharaan ruas jalan kabupaten di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama salah satu warga wilayah II yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pemeliharaan ruas jalan kabupaten (menambal jalan) yang kerap belum selesai juga, kemungkinan memang dikarenakan faktor diluar kontrol organisasi seperti faktor cuaca dan faktor alam contohnya seperti adanya curah hujan yang tidak menentu, maka dari itu untuk meminimalisir hal tersebut proses pengerjaan pemeliharaan kerap kali dilakukan ataupun dikerjakan siang atau malam hari, hal ini dilakukan agar pekerjaan selesai tepat waktu.

D. Tercapainya Tujuan

Tercapainya Tujuan yang dimaksud dari riset penelitian ini adalah berhasil atau tidaknya suatu usaha yang dilakukan dalam menggapai apa yang telah diharapkan atau direncanakan sebelumnya. Sebagaimana dapat

dicermati dari hasil wawancara bersama kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah II, menjelaskan bahwa kegiatan pemeliharaan yang sampai dengan saat ini belum mencapai tujuan yang diinginkan merupakan bagian dari apa yang harus dievaluasi Bersama oleh internal Dinas sendiri, dengan harapan bahwa dalam setiap kegiatan maupun aktivitas pemeliharaan ruas jalan di Wilayah II UPT DPUTR Kabupaten Bandung Barat kedepannya dapat memberikan manfaat yang baik demi kelancaran aktifitas masyarakat atau pengguna jalan kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama para informan adapat diketahui bahwa untuk sampai sekarang ini tujuan yang diinginkan belum tercapai dengan optimal, beberapa hambatan tidak tercapainya tujuan pemeliharaan ruas jalan di zona wilayah II ini berkaitan dengan beberapa hal yang saling berhubungan satu sama lainnya, seperti minimnya sumber daya dan cara bagaimana pemerintah melalui dinas terkait memutuskan arah kebijakan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

E. Perubahan Nyata

Perubahan nyata yang dimaksud dalam riset ini merupakan hal yang konkrit, yang nyata dari aksi yang dilakukan pihak dinas melalui UPT Wilayah II. Selain itu,

perubahan nyata juga berkaitan dengan hal yang rasional bahwa adanya kegiatan pemeliharaan ruas jalan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi keberlangsungan pemakai jalan. Selin itu juga perubahan nyata berkenaan dengan kondisi jalan apakah sudah mulus/bagus ataukah sama saja dengan sebelum diperbaiki. Berkenaan dengan hal ini hasil wawancara peneliti bersama dengan salah seorang warga di wilayah II UPT DPUTR Kabupaten Bandung Barat menjelaskan bahwa perubahan nyata dari pemeliharaan ini belum terlihat cukup baik, bahkan untuk melihat sejauh mana UPT telah efektif melaksanakan tugas pun dirasa sangat jauh. Hanya saja memang perubahan nyata yang terlihat hanya sebatas bahwa ruas jalan berlubang tengah diperbaiki.

Berdasarkan beberapa uraian hasil wawancara peneliti bersama para informan dapat diketahui bahwa sampai dengan sekarang ini perubahan nyata mengenai pemeliharaan ruas jalan belum terlihat sesuai dengan tujuan awal yang telah direncanakan, hambatan yang nyata hampir sama dengan apayang menjadi hambatan-hambatan pada aspek-aspek lain yang diteliti dalam riset penelitian ini.

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa aspek indikator teoritis yang peneliti uraikan sebelumnya seperti pada aspek pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, aspek pada pemahaman program pihak UPT telah memahami secara lebih detil, hanya saja pada aspek tepat sasaran, tepat waktu, aspek tujuan dan perubahan nyata belum menunjukkan optimalitas yang baik sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sampai dengan sejauh ini Unit teknis Pelaksana (UPT) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Wilayah II Kabupaten Bandung Barat belum optimal di dalam pemeliharaan ruas jalan di zona wilayah II Kabupaten Bandung Barat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan dalam riset penelitian ini diantaranya:

- a. Perlunya pemerintah melalui Dinas terkait untuk segera mengevaluasi kinerja dan segala masukan yang ada di lapangan;

- b. Ketersediaan sumber daya dan pihak ketiga yang bertanggung jawab menjalankan pemeliharaan ruas jalan menjadi penting untuk dievaluasi; selanjutnya
- c. Berkenaan dengan sumber daya lain seperti anggaran yang pada dasarnya mesti diperhitungkan secara rasional dan konkrit. Jangan sampai kondisi keuangan daerah tidak memenuhi atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan perihal pemeliharaan ruas jalan di masing-masing zona wilayah.

<https://www.bandungsatu.com/ironi-masyarakat-selatan-kbb-ini-deretan-foto-kerusakan-jalan-di-cililin/>

Barat, P. B. (2020). *Bandung Barat Paten No. 59*.

BBPos. (2021). *Waspada! Jalan Rusak di Cililin Ini Rawan Kecelakaan*. Bandung Barat: BBPOS. Dipetik Januari 2023, dari <https://www.bandungbaratpos.com/waspada-jalan-rusak-di-cililin-ini-rawan-kecelakaan/>

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arthur, W. (1999). *Proyek Jalan: Teori dan Praktek*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Bandung Barat. (2019). *Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kedinasan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat*. Bandung Barat: Bandung Barat.

BandungSatu.com. (2021). *Ironi Masyarakat Selatan KBB, Ini Deretan Foto Kerusakan Jalan di Cililin*. Bandung Raya: BandungSatu.com. Dipetik Januari 2023, dari

BPS Kabupaten Bandung Barat. (2022). *Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2022*. Bandung Barat: BPS Kabupaten Bandung Barat. Dipetik Oktober 13, 2022, dari <https://bandungbaratkab.bps.go.id/>

dara.co.id. (2021, Februari 8). *Jalan Berlubang, Warga Selatan Bandung Barat Ngedumel*. Bandung: dara.co.id. Dipetik Januari 2023, dari <https://www.dara.co.id/jalan-berlubang-warga-selatan-bandung-barat-ngedumel.html>

Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. (R. T. Sari, Penyunt.) Jogjakarta, Jawa

Rifi Rivani Radiansyah & Aripin, Efektivitas Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dalam Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Bandung Barat

- Tengah, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Herinoto, R. M., & Zulfanetti. (2021). Faktor penentu indeks pembangunan manusia dan hubungannya dengan belanja infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, XVI(2), 343-358. Dipetik Januari 28 2023, dari <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/download/12657/10887/34239>
- Indriastuti, D. R. (2012). Efektivitas Organisasional. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 12(1), 22-36. Dipetik Januari 2023, dari <https://media.neliti.com/media/publications/23389-ID-efektivitas-organisasional.pdf>
- Kasim, M. A. (2015). Analisis Efektivitas Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perwakilan Kabupaten Tolitoli Di Kota Palu. *e-Jurnal Katalogis*, 3(11), 151-161. Dipetik Januari 2023
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- M.Steers, R. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosa Karya.
- Mustafa, & Sasmito, C. (2017). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, VI(3), 72-76. doi:<https://doi.org/10.33366/jisip.v6i3.1462>
- Nasir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.
- PikiranRakyat.com. (2022). *Jalan di Cililin Masih Rusak, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Justru Pilih Bersolek Bangun Alun-alun*. Bandung: Pikiran Rakyat. Dipetik Januari 2023, dari <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-015498173/jalan-di-cililin-masih-rusak-pemerintah-kabupaten-bandung-barat-justru>

pilih-bersolek-bangun-
alun-alun

Jakarta: Kencana Prenada
Media Group.

- Radiansyah, R. R. (2019, Januari). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA SEKTOR BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. (R. Adiwilaga, Penyunt.) *JISIPOL*, 3(1), 1-15. Dipetik Januari 31, 2023, dari <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/12>
- Rosyid, & Lukito, L. E. (2019). Hubungan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. *Simposium Nasional Multidisiplin. 1*. Tangerang: LP3M Universitas Muhammadiyah Tangerang. doi:<http://dx.doi.org/10.31000/sinamu.v1i0.2152.g1331>
- Salim, M. (2002). *Rencana Pemeliharaan Jalan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
TribunJabar.id. (2022). *Butuh Biaya Rp 8 Miliar, Pemda KBB Tak Mampu Perbaiki Jalan Rusak di Cililin, Akan Diusulkan di 2023*. Bandung: Tribun Jabar. Dipetik Januari 2023, dari <https://jabar.tribunnews.com/2022/07/13/butuh-biaya-rp-8-miliar-pemda-kbb-tak-mampu-perbaiki-jalan-rusak-di-cililin-akan-diusulkan-di-2023>